

**STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN
DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

Harta Denay
NPP. 30.0189

*Asdaf Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email : harta.denay@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Quoted from the website of the Central Bureau of Statistics for the City of Padang that unemployment in the City of Padang is at 13.37%. This calculation shows that the unemployment rate is still high in the city of Padang. Based on the 2021 BPS, there are 6 Regencies/Cities in West Sumatra Province with unemployment above 6 percent. Padang City (13.37), Padang Pariaman Regency (8.41), Sawahlunto City (6.38), Bukittinggi City (6.09), Payakumbuh City (6.47), and Pariaman City (6.09). In connection with the above problems, the Padang City Government must work even more intensely and develop more competent governance in order to achieve better results as a form of handling the unemployment problem **Purpose:** This study aims to identify and analyze local government strategies in reducing unemployment, to identify and analyze the factors supporting and inhibiting local government strategies in reducing unemployment, to identify and analyze efforts to overcome the inhibiting factors in local government strategy in reducing the unemployment rate in Padang City, West Sumatra Province. **Method:** The research method used is a combination research method with data collection techniques used are observation, interviews, questionnaires and documentation. The theory used as an analysis in writing this thesis is to use the SWOT theory from Rangkuti which explains that the local government strategy is seen in 4 (four) aspects, namely strengths, weaknesses, opportunities, and threats. **Result:** The results of this study indicate that policing of lodging houses and boarding houses by the Civil Service Police Unit of Ende Regency has not been effective because there are still obstacles in its implementation. **Conclusion:** Based on the results of research in the field it can be concluded that first there needs to be intensity with each sub-district head in Padang City so that the sub-district head then coordinates with the head of the RT/RW related to labor force data as a result with this the data will always be updated because there is a coordination system intensively so that it does not end with a management information system that has deteriorated again. Second, there is a need for supervision of the assistance provided at the Department of Labor and Industry of the City of Padang so that assistance in the form of activity support equipment can be maintained and not just be wasted

Keywords: Strategy, Local Government, Unemployment

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP):Dikutip dari website Badan Pusat Statistik Kota Padang bahwa pengangguran di Kota Padang berada pada angka 13,37%. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya angka pengangguran di Kota Padang. Berdasarkan BPS Tahun 2021, terdapat 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan pengangguran di atas 6 persen. Kota Padang (13,37), Kabupaten Padang Pariaman (8,41), Kota Sawahlunto (6,38), Kota Bukittinggi (6,09), Kota Payakumbuh (6,47), dan Kota Pariaman (6,09). Berkaitan dengan masalah diatas, Pemerintahan Kota Padang mesti bekerja lebih intens lagi serta mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang lebih kompeten guna mencapai hasil yang lebih baik sebagai bentuk penanganan masalah pengangguran. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka pengangguran, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka pengangguran, untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya mengatasi faktor-faktor penghambat strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka pengangguran di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kombinasi dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuisisioner dan dokumentasi. Adapun teori yang dipakai sebagai analisis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teori SWOT dari Rangkuti yang menjelaskan bahwa dalam strategi pemerintah daerah dilihat pada 4 (empat) aspek yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban rumah penginapan dan Rumah Kost oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende belum efektif karena dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang dihadapi. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa pertama perlu adanya intensitas dengan setiap camat yang berada di Kota Padang sehingga dari camat tersebut kemudian berkoordinasi dengan ketua rt/rw terkait data angkatan kerja akibatnya dengan hal tersebut maka data akan selalu diperbaharui karna adanya sistem koordinasi yang intensif sehingga tidak berujung dengan sistem informasi manajemen yang kembali memburuk. Kedua perlu adanya pengawasan terhadap bantuan yang diberikan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang agar bantuan berupa perlengkapan alat penunjang kegiatan dapat dijaga keberadaannya dan tidak hanya menjadi sia-sia.

Kata kunci : Strategi, Pemerintahan Daerah, Pengangguran

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan masalah ketenagakerjaan seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003 adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat 12 menjelaskan: “Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga

kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemebri kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya”.

Dan juga pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pasal 4 disebutkan bahwa:

1. Memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Meskipun Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 telah mengalami perubahan menjadi UU Cipta Kerja tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pasal 3 menjelaskan:

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industry dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Poin di atas sudah menjelaskan mengapa pentingnya tujuan dibentuk UU Cipta Kerja

Pengangguran sendiri merupakan sebutan untuk orang yang tidak berusaha mencari pekerjaan sama sekali, waktu bekerja yang kurang dalam seminggu, atau orang yang dalam proses mengupayakan untuk mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang ada. Melihat dari segi-segi ekonomi dan sosial, maka pengangguran dapat menghasilkan berbagai permasalahan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP penelitian)

Kota Padang memiliki jumlah pengangguran paling tinggi dari Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, berikut jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel Jumlah Pengangguran Provinsi Sumatera Barat

Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TBT) (Persen)		
	2019	2020	2021
Kab. Kep. Mentawai	2,92	3,98	2,79
Kab. Pesisir Selatan	6,02	7,00	5,97
Kab. Solok	4,72	4,65	4,67
Kab, Sijunjung	3,64	5,30	3,57
Kab. Tanah Datar	3,20	4,79	4,63
Kab. Padang Pariaman	6,08	8,13	8,41
Kab. Agam	4,78	4,61	5,06

Kab. Lima Puluh Kota	2,30	3,03	2,25
Kab. Pasaman	5,28	5,04	4,92
Kab. Solok Selatan	4,91	5,62	4,84
Kab. Dharmasraya	5,06	5,31	5,00
Kab. Pasaman Barat	4,74	4,69	5,02
Kota Padang	8,74	13,64	13,37
Kota Solok	7,06	8,35	5,15
Kota Sawahlunto	6,84	8,20	6,38
Kota Padang Panjang	4,38	7,22	4,90
Kota Bukittinggi	6,20	7,51	6,09
Kota Payakumbuh	4,13	6,68	6,47
Kota Pariaman	5,48	5,73	6,09

Sumber : BPS Kota Padang

Dikutip dari website Badan Pusat Statistik Kota Padang bahwa pengangguran di Kota Padang berada pada angka 13,37%. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya angka pengangguran di Kota Padang. Berdasarkan BPS Tahun 2021, terdapat 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan pengangguran di atas 6 persen. Kota Padang (13,37), Kabupaten Padang Pariaman (8,41), Kota Sawahlunto (6,38), Kota Bukittinggi (6,09), Kota Payakumbuh (6,47), dan Kota Pariaman (6,09).

Dikutip dari surat kabar Kompas.com (7/6/2022) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang menyampaikan bahwa:

“sampai awal tahun 2022 ini, jumlah pengangguran mencapai 65.000 orang. Jumlah peningkatannya sangat drastic”.

“selain karyawan yang di PHK, setiap tahunnya juga kampus meluluskan wisudawan. Begitupun SMA, SMK dan sederajatnya juga menamatkan siswa. Sementara itu lowongan pekerjaan masih sangat minim,” sambungnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Padang Dian Fakhri.

(<https://regional.kompas.com/read/2022/06/07/201109878/pengangguran-di-padang-capai-65000-orang-meroket-selama-pandemi-covid-19>) diakses pada 15 Desember 2022

Berkaitan dengan masalah diatas, Pemerintahan Kota Padang mesti bekerja lebih intens lagi serta mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang lebih kompeten guna mencapai hasil yang lebih baik sebagai bentuk penanganan masalah pengangguran.

1.3 Penelitian Terdahulu

Skripsi Opa Andespa (2019, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) melakukan penelitian “Strategi Komunikasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Indragiri Hilir”. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana mengatasi pengangguran di Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Komunikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam mengatasi pengangguran Dinas

mempunyai strategi komunikasi yaitu menginformasikan pelatihan kerja dengan memanfaatkan UPT (Unit Pelaksana Tugas) sebagai komunikator dalam menyampaikan informasi berupa ajakan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat pengangguran di Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut penelitian Faisal Tanjung (2022, Institut Pemerintahan Dalam Negeri) melakukan penelitian “Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Penanganan Pekerja Rentan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Penanganan Pekerja Rentan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana strategi pemerintahan daerah dalam penanganan pekerja rentan sudah berjalan dengan baik namun dalam prosesnya masih ditemui kendala dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana, serta sistem informasi manajemen yang masih belum cukup baik. Kemudian menurut penelitian Zelita Valda Vania (2022, Institut Pemerintahan Dalam Negeri) melakukan penelitian “Strategi dinas Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK-1) DI Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi dinas Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK-1) DI Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sudah ada tapi belum maksimal dalam pelayanannya kepada masyarakat serta inovasi yang sempat terhenti.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas, ada beberapa hal yang menjadi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni:

1. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada pengambilan teori sehingga dari teori yang digunakan berbeda karena penelitian sebelumnya memakai teori komunikasi.
2. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada topik yang dibahasnya sehingga dari topik yang digunakan berbeda.
3. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada topik yang dibahas oleh peneliti sebelumnya sehingga dari topik pembahasan yang digunakan berbeda.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka pengangguran, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka pengangguran, untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya mengatasi faktor-faktor penghambat strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka pengangguran di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kombinasi dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Adapun teori yang dipakai sebagai analisis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teori SWOT dari Rangkuti yang menjelaskan bahwa dalam strategi pemerintah daerah dilihat pada 4 (empat) aspek yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Pemerintahan Daerah Kota Padang Dalam Menurunkan Angka Pengangguran Di Kota Padang

3.1.1 Analisis Faktor Strategis Internal dan Faktor Eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

1. Faktor Internal, yang terdiri dari:

a. Kekuatan (Strengths)

Yang menjadi strength yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang ialah:

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang memiliki struktur organisasi yang efektif, memadai, dan akurat dalam pembagian tugas sehingga proses menurunkan angka pengangguran dapat berjalan dengan baik.
- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki sumber daya manusia yang memadai sehingga arahan dapat dijalankan dengan baik.

b. Kelemahan (Weaknesses)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dian Fakri selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yakni verifikasi data pengangguran yang masih kesulitan karena luasnya wilayah Kota Padang. Kelemahan – kelemahan yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah :

- 1) Sistem Informasi Manajemen yang belum cukup baik dalam hal pendataan dan keterbaruan data yang terdapat dalam Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 2) Budaya Organisasi yang belum cukup baik dalam proses menurunkan angka pengangguran.

2. Faktor Strategis Eksternal, yang terdiri dari:

a. Peluang (Opportunities)

Peluang-peluang yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan nasional yang menjadi dasar hukum dalam menurunkan angka pengangguran sehingga menjadi prioritas dalam pemecahan permasalahan daerah.
- 2) Kondisi Tenaga Kerja yang sadar akan kebutuhannya dan keinginan yang besar untuk mendapat bantuan sehingga mudah untuk diarahkan dalam menurunkan angka pengangguran.
- 3) Kerjasama dengan pihak swasta menjadi salah satu peluang bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam membantu keefektifan menurunkan angka pengangguran.

b. Ancaman (Threats)

Ancaman-ancaman yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi geografis yang cukup luas membuat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kesulitan dalam menggapai seluruh angkatan kerja yang berada di Kota Padang.
- 2) Bencana Alam dalam hal ini virus corona menyebabkan pengangguran menjadi naik dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kesulitan dalam menurunkan angka pengangguran dikarenakan pergerakan yang dibatasi dan juga kewaspadaan terjangkau

virus corona yang kemudian menghambat kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

- 3) Kondisi Perekonomian Negara yang merosot menyebabkan menurunkan angka pengangguran menjadi terhambat bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Berdasarkan tabel matriks SWOT menurut Rangkuti, maka diperoleh hasil analisis SWOT, strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menurunkan angka pengangguran adalah sebagai berikut:

Tabel Matriks SWOT Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p>STRENGTH (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang memiliki struktur organisasi yang efektif, memadai, dan akurat dalam pembagian tugas sehingga proses menurunkan angka pengangguran dapat berjalan dengan baik. 2) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki sumber daya manusia yang memadai sehingga arahan dapat dijalankan dengan baik. 3) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki anggaran yang cukup baik untuk menurunkan angka pengangguran. 4) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki teknologi yang cukup memadai dalam proses menurunkan angka pengangguran. 	<p>WEAKNESS (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem Informasi Manajemen yang belum cukup baik dalam hal pendataan dan keterbaruan data yang terdapat dalam Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. 2) Budaya Organisasi yang belum cukup baik dalam proses menurunkan angka pengangguran. 3) Logistik/Material yang perencanaannya masih kurang baik dan kurang diperhatikan sehingga menjadi kendala dalam menurunkan angka pengangguran.
<p>OPPORTUNITY (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kebijakan nasional yang menjadi dasar hukum dalam menurunkan angka pengangguran sehingga menjadi prioritas dalam pemecahan permasalahan daerah. 2) Kondisi Tenaga Kerja yang sadar akan kebutuhannya dan keinginan yang besar untuk mendapat bantuan 	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memanfaatkan kemampuan sumber daya manusia yang memadai dengan teknologi yang cukup baik untuk memberi pelayanan terbaik kepada penganggur dalam kepengurusan hal-hal terkait dengan keperluannya. Formulir : S2, S4-O2 2) Memanfaatkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi untuk menjalin kerjasama 	<p>STRATEGI WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan sistem informasi manajemen untuk menjaga meningkatkan antusias angkatan kerja dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk bisa menurunkan angka pengangguran. Formulir : W1-O2 2) Memotivasi karyawan dalam

<p>sehingga mudah untuk diarahkan dalam menurunkan angka pengangguran.</p> <p>3) Kerjasama dengan pihak swasta menjadi salah satu peluang bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam membantu keefektifan menurunkan angka pengangguran.</p>	<p>dengan pihak swasta sehingga kepercayaan pihak swasta besar terhadap Kerjasama.</p> <p>Formular: S2-O3</p> <p>3) Mengoptimalkan anggaran yang telah memadai ditambah dengan adanya kebijakan nasional sehingga terkait anggaran akan semakin baik dan cakupan penganggur akan semakin berkurang dan terbantu.</p> <p>Formulasi : S3-O1</p> <p>4) Dengan struktur organisasi yang memadai maka dapat dimanfaatkan untuk pengefisienan sistem dalam menurunkan angka pengangguran.</p> <p>Formulasi : S1-O2</p>	<p>meningkatkan budaya organisasi yang baik sehingga kerjasama dengan pihak swasta dapat berjalan dengan baik dalam menurunkan angka pengangguran</p> <p>Formulir : W2-O3</p> <p>3) Dengan kebijakan nasional yang menjadi dasar dalam menurunkan angka pengangguran maka sarana dan prasarana yang menunjang pegawai dalam penanganan tersebut dapat diperbaiki.</p> <p>Formulasi : W3-O1</p>
<p>THREATS (T)</p> <p>1) Kondisi geografis yang cukup luas membuat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kesulitan dalam menggapai seluruh angkatan kerja yang berada di Kota Padang.</p> <p>2) Bencana Alam dalam hal ini virus corona menyebabkan pengangguran menjadi naik dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kesulitan dalam menurunkan angka pengangguran dikarenakan pergerakan yang dibatasi dan juga kewaspadaan terjangkau virus corona yang kemudian menghambat kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.</p> <p>3) Kondisi Perekonomian Negara yang merosot menyebabkan</p>	<p>STRATEGI ST</p> <p>1) Bencana alam berupa virus corona yang melanda Indonesia yang kemudian menjadi penyebab naik masalah pengangguran dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi yang memadai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menurunkan angka pengangguran ditambah dengan kualitas sumber daya yang memadai.</p> <p>Formulasi : S2,S4-T2</p> <p>2) Luasnya wilayah Kota Padang dapat diatasi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik yakni memanfaatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dalam membangun koordinasi yang baik dan intens,</p> <p>Formulasi : S2-T1</p> <p>3) Kondisi ekonomi yang merosot akibat corona dapat diimbangi dengan telah adanya</p>	<p>STRATEGI WT</p> <p>1) Meningkatkan sistem informasi manajemen dengan membangun koordinasi yang baik sehingga walaupun dengan kondisi geografis yang luas, akan tetap terjangkau melalui komunikasi yang intens.</p> <p>Formulasi : W1-T1</p>

menurunkan angka pengangguran menjadi terhambat bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.	anggaran yang baik yang sebelumnya telah dirancang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam memenuhi prioritas program Walikota Padang. Formulasi : S3-T3	
--	--	--

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

3. Menentukan Matriks IFAS dan EFAS

Faktor-faktor strategis pemerintah yang didapat kemudian dimasukkan dalam bentuk Tabel *Internal*

Tabel Penentuan Nilai Bobot IFAS Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Indikator KEKUATAN	Peringkat						Ranking	Bobot
1	Struktur organisasi yang efektif dalam mewujudkan turunya angka pengangguran	-	1	-	1	3	7	10.5	0.168
2	Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam mewujudkan turunya angka pengangguran	-	-	5	6	1	-	7.3	0.117
3	Ketersediaan anggaran yang memadai dalam mewujudkan turunya angka pengangguran	-	-	1	2	2	7	10.5	0.168
4	Ketersediaan teknologi yang memadai dalam mewujudkan turunya angka pengangguran	-	1	3	6	2	-	7.5	0.120
Sub Total								35.8	0.573
No	Indikator KELEMAHAN	Peringkat						Ranking	Bobot
1	Data yang belum lengkap dan belum terintegrasi	-	-	2	1	7	2	9.5	0.152
2	Budaya organisasi yang belum cukup mendukung	-	-	6	1	5	-	7.8	0.125
3	Sarana dan prasarana yang belum memadai	-	1	-	6	1	4	9.1	0.146
Sub Total								26.4	0.423
Total								62.2	1

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Tabel Penentuan Nilai Bobot EFAS Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Indikator PELUANG	Penilaian kondisi saat ini						Ranking	Bobot
1	Menurunnya pengangguran dengan adanya peraturan nasional yang membawahi ketenagakerjaan dalam hal tenaga kerja	-	-	2	1	6	3	9,6	0,193
2	Tingginya kesadaran para Angkatan kerja akan kebutuhan kesejahteraan sehingga lebih mudah dalam pemenuhan kesejahteraan	1	-	-	5	4	2	8,8	0,177
3	Adanya kerjasama dengan pihak swasta sehingga pengangguran menurun	-	-	5	3	1	3	8,3	0,167
Sub Total								36,6	0,57
No	Indikator ANCAMAN	Penilaian kondisi saat ini						Ranking	Bobot
1	Daerah yang luas dan tidak terpusat sehingga sulit dalam menurunkan angka pengangguran	1	6	2	3	-	-	5,1	0,103
2	Adanya pandemic covid-19 sehingga menghambat pertumbuhan tenaga kerja	-	2	-	2	2	6	9,6	0,193
3	Kondisi perekonomian negara yang memburuk sehingga menghambat penurunan angka pengangguran	1	-	1	5	5	-	8,1	0,163
Sub Total								22,8	0,459
Total								49,5	1

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

3.1.2 Analisis SWOT Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Menurunkan Angka Pengangguran di Kota Padang

1. Penghitungan Bobot dan Rating

Tabel Penghitungan Bobot x Rating IFAS

No	Indikator KEKUATAN	Rating	Bobot	Bobot X Rating	Komentar
1	Struktur organisasi yang efektif dalam mewujudkan turunya angka pengangguran	4	0,168	0,672	Dapat membentuk sistem kerja yang efektif dan efisien
2	Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam mewujudkan turunya angka pengangguran	5	0,117	0,585	Memudahkan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik
3	Ketersediaan anggaran yang memadai dalam mewujudkan turunya angka pengangguran	5	0,168	0,84	Faktor penting yang menunjang segala jenis sumber daya organisasi

4	Ketersediaan teknologi yang memadai dalam mewujudkan turunnya angka pengangguran	4	0,120	0,48	Memudahkan pegawai dalam pelaksanaan program
Sub Total			0,573	2,577	-

2.

No	Indikator KELEMAHAN	Rating	Bobot	Bobot X Rating	Komentar
1	Data yang belum lengkap dan belum terintegrasi	1	0,152	0,152	Akibat dari luasnya wilayah sehingga tanpa koordinasi yang baik menyebabkan pendataan yang sulit
2	Budaya organisasi yang belum cukup mendukung	2	0,125	0,250	Sistem kerja yang menjadi terhambat dalam pelaksanaan program.
3	Sarana dan prasarana yang belum memadai	1	0,146	0,146	Sistem kerja yang menjadi terhambat.
Sub Total			0,423	0,548	-
Total			1	3,125	-

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Tabel Penghitungan bobot x rating EFAS

No	Indikator PELUANG	Rating	Bobot	Bobot X Rating	Komentar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menurunnya pengangguran dengan adanya peraturan nasional yang membawahi ketenagakerjaan dalam hal tenaga kerja	5	0,193	0,965	Menjadi dasar pemerintah daerah untuk fokus kepada Disnakerin dalam menurunkan angka pengangguran
2	Tingginya kesadaran para Angkatan kerja akan kebutuhan kesejahteraan sehingga lebih mudah dalam pemenuhan kesejahteraan	5	0,177	0,885	Memudahkan pemerintah dalam mengarahkan Angkatan kerja
3	Adanya kerjasama dengan pihak swasta sehingga pengangguran menurun	5	0,167	0,835	Meningkatkan cakupan jaringan untuk Angkatan kerja dalam pemberian bantuan
Sub Total			0,537	2,685	-

No	Indikator ANCAMAN	Rating	Bobot	Bobot X Rating	Komentar
1	Daerah yang luas dan tidak terpusat sehingga sulit dalam menurunkan angka pengangguran	1	0,103	0,103	Menyebabkan pendataan yang sulit karena tidak terjangkau perangkat pemerintahan

2	Adanya pandemic Covid-19 sehingga menghambat pertumbuhan tenaga kerja	1	0,193	0,193	Menyulitkan pergerakan pegawai dan terus meningkatkan jumlah tenaga kerja
3	Kondisi perekonomian negara yang memburuk sehingga menghambat penurunan angka pengangguran	2	0,163	0,326	Berdampak pada anggaran yang kemungkinan menurun dalam menurunkan angka pengangguran
Sub Total			0,459	0,622	-
Total			1	3,307	-

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

3.1.3 Formulasi Strategi

Formulasi strategi dari hasil susunan faktor-faktor internal dan eksternal sebelumnya maka menghasilkan rangkaian skor sebagai berikut:

- Kekuatan (Strengths) = 2,577
- Kelemahan (Weaknesses) = 0,548
- Peluang (Opportunities) = 2,685
- Ancaman (Threats) = 0,622

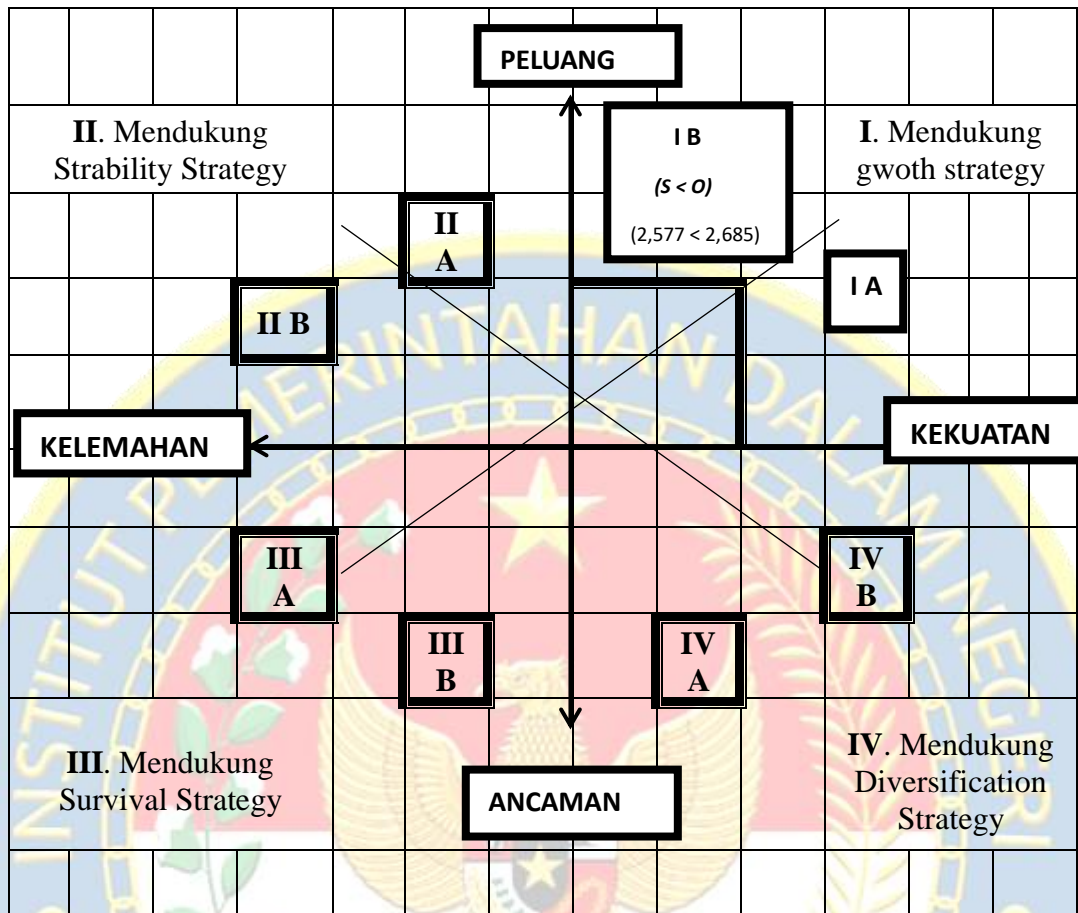
Dari rangkaian nilai skor tersebut, maka dapat disusun sebuah tabel Rekapitulasi Nilai Skor IFAS dan EFAS sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Nilai Skor IFAS dan EFAS

Skor Internal	Skor Eksternal	Pilihan Strategi
$S > W (+)$ 2,577 > 0,548	$O > T (+)$ 2,685 > 0,622	Growth
$S < W (-)$	$O < T (-)$	Survival
$S > W (+)$	$O < W (-)$	Diversification
$S > W (-)$	$O > T (+)$	Stability

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Gambar Diagram Analisis SWOT Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian



Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Tabel Pilihan Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Teknis Strategis	Skor	Kuadran	Pilihan Strategi
<i>Growth</i>	$S > O$	I A	<i>Rapid Growth</i>
	$S < O$	I B	<i>Stable Growth</i>
<i>Survival</i>	$W > T$	II A	<i>Turn Around</i>
	$W < T$	II B	<i>Guerilla</i>
<i>Diversification</i>	$S > T$	III A	<i>Conglomeratic</i>
	$S < T$	III B	<i>Concentric</i>
<i>Stability</i>	$O > W$	IV A	<i>Aggressive Maintenance</i>
	$O < W$	IV B	<i>Selective Maintenance</i>

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

3.2.1 Faktor Pendukung Menurunkan Angka Pengangguran

3.2.1.1 Faktor Pendukung Internal

Faktor pendukung internal adalah salah satu faktor yang mendukung strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka pengangguran.

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Harmadi Algamar, S.STP, M.Si, M.Han yang mengatakan: “Pemerintah Kota Padang sangat mendukung dalam menurunkan angka pengangguran karena ini salah satu target utama dalam program kerja, untuk struktur organisasi, kami selalu mendukung perubahan-perubahan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk mencapai kinerja terbaik dan mendapat hasil terbaik”. Pernyataan lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Ir. H. Dian Fakri, MSP yang mengatakan: “Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah beberapa kali merekonstruksi struktur organisasi yang ada dalam mencapai keefektifan dan keefisienan dan dengan struktur sekarang, masih belum terdapat kendala dan masalah dalam menurunkan angka pengangguran di Kota Padang”.

b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Harmadi Algamar, S.STP, M.Si, M.Han yang mengatakan: “Pemerintah Kota Padang sangat memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota Padang khususnya di dalam organisasi pemerintahan daerah, kami terus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan fasilitas pelatihan-pelatihan pengembangan kualitas diri dan lain sebagainya untuk mencapai kualitas yang terus semakin membaik”.

c. Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Harmadi Algamar, S.STP, M.Si, M.Han yang mengatakan: “Dengan adanya pandemic covid-19 ini, tentu kami melihat adanya pembengkakan jumlah tenaga kerja informal yang disebabkan karena banyak phk yang terjadi, dan terlihat jumlah Angkatan kerja semakin bertambah pula sehingga kami mendukung dalam menurunkan pengangguran yang jumlahnya besar”.

d. Teknologi

Pernyataan lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ir. H. Dian Fakri, MSP yang mengatakan : “Teknologi itu sangat penting dalam menunjang kinerja, maka kami mendukung pemberian fasilitas berupa teknologi yang diperlukan dalam menurunkan angka pengangguran yang saat ini jumlahnya sangat membengkak karena telah terjadinya pandemi covid-19 sehingga menjadi prioritas program pemerintah daerah”.

3.2.1.2 Faktor Pendukung Eksternal

a. Kondisi Tenaga Kerja

Pernyataan lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja M. Faizal yang mengatakan:

Kami melihat bahwa para tenaga kerja khususnya angkatan kerja sangat antusias terhadap perhatian Pemerintah Daerah melalui Disnakerin dalam memberikan bantuan kepada mereka, mereka ramai-ramai datang untuk mengurus berkas-berkas persyaratan untuk ikut dalam pelatihan guna menambah skill dalam pekerjaan.

b. Kerjasama Dengan Pihak Swasta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informal, pernyataan disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Ir. H. Dian Fakri, MSP yang mengatakan: “Kami

untuk saat ini belum bekerjasama dengan pihak swasta manapun, memang penting untuk kerjasama dengan pihak swasta dalam melatih angkatan kerja yang akan diberikan bantuan, untuk saat ini sudah tapi belum maksimal dalam menjalin Kerjasama”.

3.2.2 Faktor Penghambat Menurunkan Angka Pengangguran

3.2.2.1 Faktor Penghambat Internal

a. Sistem Informasi Manajemen

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Ir. H. Dian Fakri, MSP yang mengatakan: “Kami kesulitan dalam pembaruan data para angkatan kerja, kami kesulitan dalam mengetahui siapa saja angkatan kerja yang telah meninggal, kami kekurangan dibagian sana sehingga tanpa ada info dari kerabat atau keluarga angkatan kerja yang meninggal maka kami pun tidak mengetahui hal tersebut dan datanya masih tercatat sebagai angkatan kerja yang aktif”.

b. Budaya Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Harmadi Algamar, S.STP, M.Si, M.Han yang mengatakan “Dengan sebelumnya adanya pandemi covid-19 menyebabkan tingkat kualitas budaya organisasi yang menurun dari para pekerja karena diterapkannya WFH (*work from home*) sehingga kedisiplinan menurun”.

c. Sarana Dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Ir. H. Dian Fakri, MSP yang mengatakan: “Sarana dan prasarana menjadi perlu dalam hal menurunkan angka pengangguran, oleh karenanya hal ini menjadi fokus pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sarana prasarana yang memadai dalam menurunkan angka pengangguran”.

3.2.2.2 Faktor Penghambat Eksternal

a. Kondisi Geografis

Pernyataan lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja M. Faizal yang mengatakan “Kita memang menyadari bahwa Kota Padang sangatlah luas sehingga jika dikaitkan dengan Angkatan kerja maka tentu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kesulitan dalam menjangkau mereka yang ada perbatasan daerah”.

b. Bencana Alam

Pernyataan lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Widia Apriyanti, S.STP, MM yang mengatakan “pandemic memang menyulitkan, bukan hanya bagi kami dalam menjalankan aktivitas tetapi para Angkatan kerja pun kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sehingga itulah kenapa jumlah pengangguran terus membesar”.

c. Kondisi Perekonomian Negara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Harmadi Algamar, S.STP, M.Si, M.Han yang mengatakan “Dengan keadaan mendesak saat ini, maka memang terlihat ada kemungkinan kondisi perekonomian Negara yang merosot dan berujung pada anggaran yang menurun terutama dalam hal menurunkan angka pengangguran”.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Menurunkan Angka Pengangguran di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

3.3.1 Upaya Langsung

3.3.1.1 Upaya Langsung Internal

a. Perbaiki Sistem Informasi Manajemen

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Ir. H. Dian Fakri, MSP yang mengatakan:

Dalam mengatasi sistem informasi manajemen yang belum cukup baik maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang merekonstruksi proses pendataan Angkatan kerja dengan membuat komunikasi secara intensif dengan camat yang ada di Kota Padang untuk membuat sistem hirarki intensif untuk mendapatkan data-data terbaru dari tempat-tempat yang mungkin tidak terjangkau jika hanya perangkat Disnakerin saja yang bergerak.

b. Bantuan Sarana Dan Prasarana

Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ir. H. Dian Fakri, MSP yang mengatakan: “Dalam menurunkan angka pengangguran tentunya diperlukan dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai, oleh karena itu, pemerintah Kota Padang memberikan bantuan sarana dan prasarana dari untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam menurunkan angka pengangguran”.

3.3.1.2 Upaya Langsung Eksternal

a. Peningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja

Pernyataan terkait hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Ir. H. Dian Fakri, MSP yang mengatakan “Harus mengetahui apa yang menjadi syarat dan sudah menjadi angkatan kerja melalui informasi yang disampaikan secara elektronik.”

3.3.2 Upaya Tidak Langsung

3.3.2.1 Upaya Tidak Langsung Internal

a. Upaya Tidak Langsung Internal Melalui Koordinasi Dengan OPD

Pernyataan mengenai koordinasi dengan OPD disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Ir. H. Dian Fakri, MSP yang mengatakan “Memberikan syarat secara keseluruhan administrasi yang lengkap ke OPD terkait yang menjadi perantara sehingga dalam proses pengerjaannya dapat berjalan dengan baik.”

3.3.2.2 Upaya Tidak Langsung Eksternal

a. Kebijakan Nasional

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Ir. H. Dian Fakri, MSP yang mengatakan: “Upaya mengatasi faktor penghambat yang ada ialah dengan menganalisis faktor penghambat tersebut yang kemudian di formulasikan program-program upaya dalam mengatasi faktor penghambat yang mana program tersebut telah

tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dengan tindak lanjut kegiatan aktualisasi di lapangan”.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

1. Strategi Yang Akan Dilakukan Pemerintahan Daerah dalam Menurunkan Angka Pengangguran di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

- a. Memanfaatkan kemampuan sumber daya manusia yang memadai dengan teknologi yang cukup baik untuk memberi pelayanan terbaik kepada penganggur dalam kepengurusan hal-hal terkait dengan keperluannya.
- b. Memanfaatkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta sehingga kepercayaan pihak swasta besar terhadap kerjasama.
- c. Mengoptimalkan anggaran yang telah memadai ditambah dengan adanya kebijakan nasional sehingga terkait anggaran akan semakin baik dan cakupan pengangguran akan semakin berkurang dan terbantu.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Pemerintahan Daerah dalam Menurunkan Angka Pengangguran di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

a. Faktor Pendukung

1) Faktor Pendukung Internal

- **Struktur Organisasi yang Terarah dan Spesifik**

Dalam pelaksanaan menurunkan angka pengangguran di Kota Padang sangat didukung oleh struktur organisasi yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, hal tersebut berkat dukungan dari pemerintah daerah sehingga struktur organisasi yang ada menjadikan organisasi menjadi lebih baik disebabkan adanya pembagian tupoksi yang jelas dan spesifik.

2) Faktor Pendukung Eksternal

- **Kondisi Tenaga Kerja**

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan adalah kondisi tenaga kerja menyikapi program Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menurunkan angka pengangguran sangat besar.

b. Faktor Penghambat

1) Faktor Penghambat Internal

- **Sistem Informasi Manajemen Yang Kurang Memadai**

Sistem informasi manajemen menjadi faktor pendukung dalam menurunkan angka pengangguran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Namun ketersediaan sistem informasi manajemen masih belum tersedia dengan baik.

2) Faktor Penghambat Eksternal

- **Kondisi Geografis**

Kesimpulan bahwa salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam menurunkan angka pengangguran yaitu kondisi geografis dimana Padang memiliki luas yang cukup sehingga menyulitkan pemerintah dalam menggapai angkatan kerja di seluruh penjuru Kota Padang.

3. Strategi Dalam Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Pemerintahan Daerah Dalam Menurunkan Angka Pengangguran di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

a. Upaya Langsung

1) Upaya Langsung Internal

Perbaiki Sistem Informasi Manajemen dengan meningkatkan insentitas koordinasi dengan camat-camat yang berada di Kota Padang

2) Upaya Langsung Eksternal

Strategi Pemerintahan Daerah dalam menurunkan angka pengangguran di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat terdapat suatu upaya berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal ini Angkatan kerja akan kesadaran dalam hal administrasi.

a. Upaya Tidak Langsung

1) Upaya Tidak Langsung Internal

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi Pemerintahan Daerah dalam Menurunkan Angka Pengangguran di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat terdapat suatu upaya berupa koordinasi yang baik dengan OPD terkait hal administrasi untuk angkatan kerja.

2) Upaya Tidak Langsung Eksternal

Kebijakan Nasional yang dikeluarkan guna menjadi pedoman dalam menurunkan angka pengangguran dan menjadi dasar hukum yang menjadikan angkatan kerja prioritas dalam kinerja Pemerintah Daerah.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama perlu adanya intensitas dengan setiap camat yang berada di Kota Padang sehingga dari camat tersebut kemudian berkoordinasi dengan ketua rt/rw terkait data angkatan kerja akibatnya dengan hal tersebut maka data akan selalu diperbaharui karna adanya sistem koordinasi yang intensif sehingga tidak berujung dengan sistem informasi manajemen yang kembali memburuk. Kedua perlu adanya pengawasan terhadap bantuan yang diberikan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang agar bantuan berupa perlengkapan alat penunjang kegiatan dapat dijaga keberadaannya dan tidak hanya menjadi sia-sia.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Strategi Pemerintah Daerah dalam Menurunkan Angka Pengangguran di Kota Padang, untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Rangkuti, F. (2016). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Umum.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Skripsi Opa Andespa. 2019, *Strategi Komunikasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Indragiri Hilir*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Skripsi Faisal Tanjung. 2022,) *Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Penanganan Pekerja*

Rentan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Skripsi Zelita Valda Vania. 2022, *Strategi dinas Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK-1) DI Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.* Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Badan Pusat Statistik. (2022b). *Tenaga Kerja.*
[Www.Bps.Go.Id.https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html](http://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html)
<https://regional.kompas.com/read/2022/06/07/201109878/pengangguran-di-padang-capai-65000-orang-meroket-selama-pandemi-covid-19> diakses pada 15 Desember 2022

